

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,
salam sejahtera dan salam kemanusiaan,*

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melaksanakan program dan kegiatan pada semester I tahun anggaran 2025 dengan baik, walaupun kegiatan baru terlaksana sekitar 50 % dan masih banyak kekurangan. Kami berharap pelaksanaan di semester II hasilnya akan lebih baik dan semua Program dan Kegiatan dapat terlaksana sesuai target indikator yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan telah dilaksanakan di tahun berjalan ini namun dalam pelaksanaan Rencana Kerja tersebut, terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah. Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan, baik di tingkat SKPD ataupun di tingkat Kabupaten.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disusun sebagai respon atas perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sehingga diharapkan dengan adanya Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat lebih mengoptimalkan pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dan peningkatan tugas-tugas kami ke depan, serta perencanaan program tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kami dalam melanjutkan tugas-tugas kemanusiaan saat ini dan di masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Karanganyar, 26 Juni 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Karanganyar



HENDRO PRAYITNO, S.H.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760531 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUANI-1

 1.1. Landasan HukumI-1

 1.2. Maksud.....I-2

 1.3. TujuanI-2

 1.4. SISTEMATIKA PENULISANI-2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025 II-1

BAB IIIRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025..... III-1

BAB IVPENUTUP..... IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 serta bersifat indikatif.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar terjadi perubahan umum kebijakan penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal sehingga perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk merespon adanya dinamika tersebut.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31).
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16)

1.2. Maksud

Maksud dari disusunnya perubahan rencana kerja ini adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan OPD yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan menyesuaikan perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat kabupaten;
2. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan SKPD yang terjadi dalam tahun berjalan.

1.3. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan BPBD adalah :

1. Tersedianya dokumen yang menjadi acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPBD.
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam laporan Pelaksanaan Operasional Kegiatan sampai dengan Bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		2.908.570.149	1.495.905.175	51,4	0
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	3.672.000	13,11	0
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	28.000.000	3.672.000	13,11	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	0	0	0
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.339.330.149	1.153.253.258	49,34	50
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.337.330.149	1.153.253.258	49,34	50
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0	0	0
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.250.000	42.171.675	99,8	100
1.	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	42.250.000	42.171.675	99,8	100
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.000.000	57.501.100	55,8	75,8
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	100	100
2.	Penyediaan peralatan dan	5.000.000	4.373.100	87,46	88

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
	perlengkapan kantor				
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	6.725.000	67,25	81
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	2.925.000	58,5	62
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	3.980.000	79,6	80
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.000.000	33.898.000	47,08	45
7.	Penataan Arsip daerah pada SKPD	2.000.000	1.600.000	80	75
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
1.	Pengadaan Mebel	0	0	0	0
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0	0	0	0
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.600.000	33.859.580	43,63	45
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	700.000	35	40
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.600.000	33.159.580	43,86	50
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.390.000	178.739.562	56,49	69,3
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	271.390.000	178.739.562	65,86	67
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30.000.000	11.708.000	39	41
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000	15.000.000	100	100
B.	Program Penanggulangan Bencana	2.437.104.000	948.725.599	38,9	47

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
I.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	80.000.000	6.000.000	7,5	50
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	75.000.000	6.000.000	8	50
2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
II.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	324.500.000	183.037.500	56,40	51,5
1.	Pengelolaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	15.000.000	15.000.000	100	100
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.000.000	29.891.500	99,6	100
4.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.000.000	20.000.000	100	100
5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30.000.000	20.000.000	66,67	66,67
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	16.000.000	0	0	0
7.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
8.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	5.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
9.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	3.200.000	64	100
10.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
11.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	94.946.000	94,9	100
III.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.851.604.000	704.571.000	38	54,3
1.	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	4.000.000	80	100
2.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1.698.604.000	573.699.000	33,77	50
3.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	15.000.000	0	0	0
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	125.000.000	125.000.000	100	76
6.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3.000.000	1.872.000	62,4	100
IV.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	291.170.000	55.117.099	18,9	33,3
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
2.	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	125.000.000	0	0	0
3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	2.917.099	58,3	50
4.	Pembinaan dan Pengawasan	15.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			% FISIK
		PAGU	REALISASI	%	
	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	100	100
6.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0
7.	Koordinasi Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	25.000.000	10.700.000	42,8	50
8.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	3.500.000	3.500.00	100	100
9.	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota	3.000.000	0	0	0
10.	Penguatann Kelembagaann Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
11.	Penyusunan kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstrukksi Pasca bencana (R3P) Kabupaten/Kota.	3.000.000	3.000.000	100	100
12.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	0	0	0
	JUMLAH	5.345.674.149	2.444.630.774	45,7	57

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar, Juni 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dengan 10 kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Sampai dengan bulan Juni 2025 urutan persentase capaian realisasi keuangan program tersaji dalam tabel berikut ini :

NO	NAMA PROGRAM	% REALISASI KEUANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51,4

NO	NAMA PROGRAM	% REALISASI KEUANGAN
2.	Program Penanggulangan Bencana	38,9

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan BPBD Kabupaten Karanganyar, Juni 2025

Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, terlihat realisasi keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota atau Program rutin lebih besar yaitu 51,4 % jika dibandingkan dengan realisasi Program Penanggulangan Bencana atau Program Tupoksi yaitu 38,9 %.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PERUBAHAN TAHUN 2025

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Pusat maupun daerah, salah satunya adalah terbitnya Inpres Nomer 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Adapun rekapitulasi perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai	86	2.908.570.149	86	2.965.211.049	-	56.640.900	1,94
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	30.000.000	100	24.477.000	0	-5.523.000	-18,41
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1 dok	28.000.000	1 dok	23.852.000	0	-4.148.000	-14,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SDPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	2.000.000	1 dok	625.000	0	-1.375.000	-68,75

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.339.330.149	100%	2.337.977.149	-	- 1.353.0000	-0,058
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	2.337.330.149	19 orang/bulan	2.337.330.149	-	0	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.000.000	1 laporan	647.000	-	-1.353.000	-67,65
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	103.000.000	100%	72.227.000	-	-28.773.000	-27,9
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 paket	4.000.000	8 paket	4.000.000	-	0	0.00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	5.000.000	16 paket	4.383.500	-	-616.500	-12,33
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	22 paket	10.000.000	22 paket	11.600.000	-	1.600.000	16
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	5.000.000	6 paket	4.000.000	- 2	-1.000.000	-20
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	5.000.000	8 laporan	4.000.000	-2	-1.000.000	-20
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	72.000.000	55 laporan	42.643.500	-45	-32.356.500	59,2
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	80 dokumen	2.000.000	60 dokumen	1.600.000	-20	-400.000	-20

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD	0%	0	0%	0	-	0	0
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	0	0	00.00
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0	0 jenis	0	0	0	00.00
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD	100%	77.600.000	100%	77.600.000	-	0	0.00
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	2.000.000	10 laporan	2.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	75.600.000	36 laporan	75.600.000	0	0	0
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD	100%	316.390.000	100%	404.167.400	-	87.777.400	27,74
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	271.390.000	21 unit	346.497.400	-	75.107.400	46
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	56 unit	30.000.000	60 unit	42.670.000	4	12.670.000	42,2
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	-	0	0,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Kantor dan Bangunan Lainnya	dipelihara/ direhabilitasi							
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 % 100% 100%	2.437.104.000 2.437.104.000 2.437.104.000	100% 100% 100%	2.341.034.600 2.341.034.600 2.341.034.600	- - -	-96.069.400 -96.069.400 -96.069.400	-3,94 -3,94 -3,94
I.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Karanganyar	100%	80.000.000	100%	62.600.600	-	-12.399.400	-21,7

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang termasuk yang mendapat sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2000 orang	75.000.000	2000 orang	59.950.600	-	-12.399.400	-16,53
2.	Penyusunan kajian Risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.650.000	-	-2.350.000	-47

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
II.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100%	236.000.000	100%	223.329.750	0	-12.670.250	-5,37
1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	5.075.000	0	75.000	1,5
2.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas	10 unit	15.000.000	10 unit	15.000.000	-	0	0
3.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	250 orang	30.000.000	250 orang	30.136.500	-	136.500	0,45
4.	Pelatihan keluarga Tanggap bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan Keluarga	45 keluarga	20.000.000	45 keluarga	20.000.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		Tanggap bencana Alam							
5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan kesiapsiagaan bencana	6 kawasan	30.000.000	6 kawasan	50.000.000	0	0	00.00
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	20 orang	16.000.000	20 orang	14.141.400	-	-1.858.600	-11,6
7.	Penyusunan rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	5.000.000	1 dok	2.500.000	-	-2.500.000	-50
9.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	5.000.000	1 laporan	3.280.850	-	-1.719.150	-34,38
10.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	2.500.000	0	-2.500.000	50

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
11.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	3 kawasan	100.000.000	3 kawasan	95.696.000	-	-4.304.000	-4,3
III.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakausi Korban Bencana	100%	1.851.604.000	100%	1.817.947.700	-	-33.656.300	-1,8
1.	Respon Cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 laporan	5.000.000	1 laporan	4.015.150	-	-984.850	-19,69

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	600 orang	1.698.604.000	600 orang	1.672.554.000	-	-26.050.000	-1,53
3.	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	3.000.000	-	-2.000.000	-40
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	20 orang	15.000.000	20 orang	11.112.950	0	-3.887.050	-25,9
5.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan	400 orang	125.000.000	400 orang	125.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		evakuasi korban bencana							
6.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporam pelaksanaan aktivasi sistem komando Penanganan Darurat bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	3.000.000	1 laporan	2.265.600	0	734.400	-24,48
IV.	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	<i>Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>	100%	269.500.000	100%	237.156.550	0	-32.343.450	-12.00
1.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.418.850	0	-3.581.150	-71,6
2.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	121.785.000	0	-3.215.000	-2,57

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	0	0	00.00
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.011.000	0	11.000	0,07
5.	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	62 orang	35.000.000	62 orang	35.000.000	0	0	0
6.	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur BPBD kabupaten/ kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana	75 orang	40.000.000	37 orang	30.811.000	0	-9.189.000	-22,9

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P)							
7.	Koordinasi penanganan Pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 kegiatn	25.000.000	1 kegiatan	17.633.700	0	-7.366.300	-29,46
8.	Peningkatan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi	10 lembaga	3.500.000	10 lembaga	3.500.000	-	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal							
9.	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 laporan	3.000.000	1 laporan	1.400.000	0	-600.000	-30
10.	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	1.975.000	0	-3.025.000	-60,5
11.	Penyusunan Kajian Kabupaten Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	0	0	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2025						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dan Rekonstruksi Pscabencana (R3P) Kab/Kota	dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							
12.	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	622.000	-	-4.378.000	-87,56
JUMLAH ANGGARAN				5.345.674.149		5.306.245.649	-	-39.428.500	-0,74

Dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 tidak ada penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perubahan anggaran tahun 2025 ini justru terjadi pengurangan anggaran untuk menindaklanjuti Inpres Nomer 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Efisiensi atau pengurangan anggaran ini terutama pada rekening belanja perjalanan dinas, makan minum rapat atau tamu dan Alat Tulis Kantor.

Program yang mengalami perubahan Pagu tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM	% PERUBAHAN ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,94
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-3,94

Perubahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah penambahan sebesar 1,94% dari anggaran sebelumnya. Tambahan Anggaran ini adalah pergeseran dari efisiensi pada Program Penanggulangan Bencana. Tambahan anggaran digunakan untuk mencukupi kebutuhan rutin seperti BBM dan pemeliharaan yang belum terpenuhi dari anggaran penepatan.

Perubahan Anggaran lainnya adalah pada Program Tupoksi yaitu Program Penanggulangan Bencana dengan *pengurangan* sebesar 3,94% dari anggaran sebelumnya yaitu berupa efisiensi di rekening Belanja Perjalanan Dinas, Makan minum Rapat/ Tamu dan Alat Tulis Kantor.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPBD tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja 2025 ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

